

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan pencermatan dokumen. Data dianalisis dengan tahapan mengorganisasikan data, reduksi data, pengelompokkan berdasarkan kategori, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana Efektifitas peran pengawasan dan pembinaan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan peradilan bermartabat; 2. Apa yang menjadi hambatan dan Pendorong Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan peradilan bermartabat; 3. Bagaimana merekonstruksi Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan peradilan bermartabat. Hasil Pengawasan dan pembinaan pengadilan Pengadilan Tinggi harus dapat memberikan dampak secara internal maupun eksternal. Dari data penelitian yang didapatkan ada 5 pelanggaran hukum di antaranya adalah 1 (satu) Hakim dan 5 (lima) pegawai di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian dari kasus tersebut juga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan Usulan Mutasi dan Promosi. Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di tingkat Mahkamah Agung, aplikasi pengadilan elektronik (e-Court), dan Direktori Putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung. Sedangkan di bidang non teknis, Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) untuk pengelolaan data keuangan, Sistem informasi pengawasan (SIWAS) untuk pengawasan dan pengendalian, Sisdiklat (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan). Pengadilan Tinggi Jawa tengah juga mengembangkan aplikasi SILAPER ( system Informasi Layanan Perkara) sebagai Asisten Virtual. Pembinaan tidak hanya terhadap hakim saja, tetapi melakukan pembinaan juga terhadap tenaga administrasi peradilan, Selain itu, undang-undang telah menetapkan bahwa pengawasan tidak boleh mengurangi independensi hakim. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan Pasal 39 sampai dengan 44 harus di Hapus dan di Buatkan Undang-Undang baru terkait dengan pengawasan dan pembinaan, Peneliti berharap tidak hanya Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, agar peradilan ini dapat berjalan dengan baik peneliti berharap Pengadilan Tinggi dan Komisi Yudisial, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dan Badan Keuangan baik masyarakat, akademisi dan penegak hukum turut serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Pengadilan Tinggi, Peradilan Bermartabat.**

## ABSTRACT

This study aims at a descriptive analysis with qualitative approach. Data collection techniques using interview, observation, and scrutiny of documents. Data were analyzed with the stages of organizing the data, data reduction, grouping by categories, data display, and conclusion. In this study the problem can be formulated as follows: 1. How the Effectiveness of the role of supervision and coaching is under the jurisdiction of the High Court of Central Java to realize the judicial dignity; 2. What are the obstacles and the Driving force of the Implementation of supervision and coaching in the under parts of the law of the High Court of Central Java to realize the judicial dignity; 3. How to reconstruct the Implementation of the supervision and coaching under parts of the law of the High Court of Central Java to realize the judicial dignity. The results of the Supervision and guidance of the court of the High Court should be able to deliver impact internally and externally. From the research data obtained there is a 5 violation of the law of which is one (1) Judges and five (5) employees under the High Court of Central Java. Then from the case of the proficiency level is also the High Court of Central Java to do the Proposed Mutation and Promotion. The Supreme court has developed a System of Information Case tracking (SIPP) in the Court of First instance and Appeals, Information Systems Administration of the Case (SIAP) at the Supreme Court level, the application of the court's electronic (e-Court), and that the Decision to publish the verdict-the verdict of the Supreme Court. While in the field of non-technical, the Supreme Court has developed an human resources Information System (SIKEP) for Human Resource management (HR), Komdanas application (National Data Communications) for the management of financial data, information System supervision (SIWAS) for supervision and control, Sisdiklat (Information Systems Education and Training). The High court of central Java to develop applications SILAPER (Information system Service Case) as a Virtual Assistant. Coaching not only against the judges of course, but coaching is also to be the administration of justice, in Addition, legislation has been established that supervision should not reduce the independence of the judges. The Judicial authority law in accordance with Article 39 to 44 should be abolished and Made new Laws associated with supervision and coaching, the Researchers hope not only Perma No. 8 2016 about the Supervision and Guidance of superiors directly in the Supreme Court and Judicial Bodies underneath, so that the judiciary can be run by better researchers hope the High Court and the Judicial Commission, Ombudsman Representatives of Central and Agency Financial community, academics and law enforcement participated as well as perform supervision in order not to occur irregularities.

**Keywords: Implementation, Supervision and Guidance, the High Court, the Judicial Dignity.**